

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan ini mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara opportunity dengan mengambil keuntungan sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Ketika sebuah perusahaan berkembang menjadi besar dan pemegang saham semakin tersebar, maka semakin banyak biaya agensi yang terjadi dan pemilik tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) potensi konflik kepentingan dapat terjadi diantara pihak-pihak yang berhubungan seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan atau antara pemegang saham dengan kreditur. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Teori agensi sangat sulit untuk diterapkan dan memiliki banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para stakeholder. Konsep tersebut harus berhubungan dengan masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang timbul, sehingga berkembang suatu konsep baru yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak terkait dengan kepemilikan dan pengoperasian (stakeholder) suatu perusahaan, yaitu konsep corporate governance.

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536

Corporate Governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang diinvestasikan (Herawaty,2008). Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana investor memiliki keyakinan bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor dan yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan,atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan yang berkaitan dengan dana atau modal yang telah ditanamkan oleh investor,serta berkaitan dengan bagaimana seorang investor mengendalikan para manajer(Sheifer dan Vishny,1997)

Teori keagenan merupakan dasar untuk memahami corporate governance. Hal tersebut dikarenakan teori keagenan mengindikasikan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga teori agensi menjadi dasar pemikiran bahwa kinerja perusahaan yang lebih baik dapat dicapai karena adanya good corporate governance (Haat,et al,2008). Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu bahwa kinerja suatu perusahaan yang baik akan dicapai karena pada kenyataan terdapat praktek-praktek pemerintahan yang baik juga. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pemantauan dan perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang sahamnya (Haat,et al,2008).

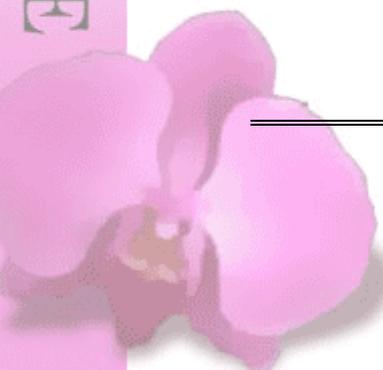
2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Definisi Good Corporate Governance

Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2001 pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan”.

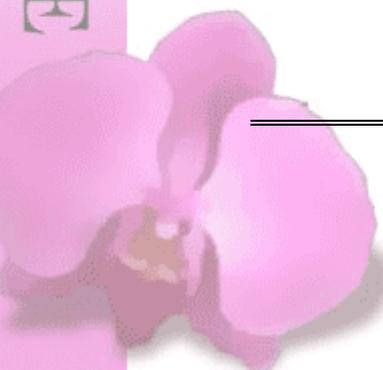
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG):
 “Good Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”. (KNKCG, 2004).

Berdasarkan pengertian diatas, Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola tata kelola perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Penerapan Corporate Governance memberikan empat manfaat (FCGI, 2001), yaitu: meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih mudah, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan meningkatkan shareholders’s value Good Corporate Governance terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan (Corporate Governance internal perusahaan) dan unsur yang berasal dari luar perusahaan (Corporate Governance eksternal Perusahaan).

Corporate Governance internal perusahaan adalah unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan. Jika kinerja Corporate Governance internal baik maka kinerja perusahaan pun baik dan sebaliknya. Unsur-unsur Corporate Governance

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
 MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
 PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



internal perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem, dan komite audit.

Corporate Governance eksternal perusahaan adalah unsur yang selalu dibutuhkan atau diperlukan di luar perusahaan dan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun unsur-unsur Corporate Governance eksternal perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan pengesah legalitas (Kresnohadi, 2000)

2.2.2 Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan Corporate Governance. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance yang dikutip oleh Sedarmayanti diutarakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi :

1). Fairnes (Kewajaran)

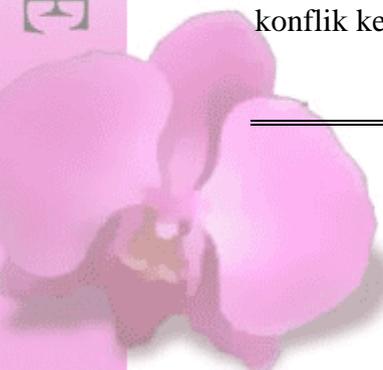
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



c. Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

2). Disclosure dan Transparency (Transparansi)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

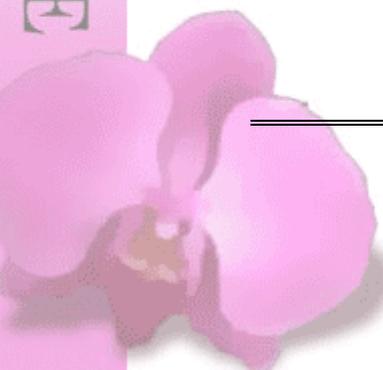
- a. Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasis standar akuntansi
- b. Mengembangkan informasi teknologi dan management information system untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3). Accountability (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal.



4). Responsibility (Responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
- b. Menyadari akan adanya tanggung jawab social.
- c. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- d. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut :

- a. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
- b. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan”.

2.2.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Corporate Governance yang baik diakui membantu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal GCG yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat. Penerapan GCG dalam suatu

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



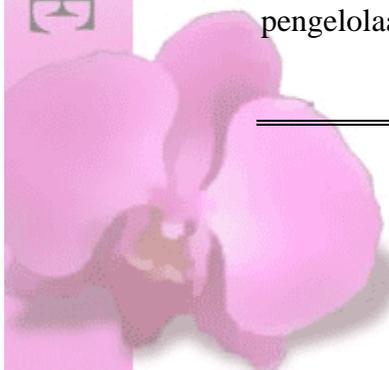
perusahaan sendiri mempunyai tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional; dan
6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah

2.2.4 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian



yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini dewan direksi memiliki tugas antara lain :

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Di Indonesia tidak ada batasan jumlah dewan direksi. Jumlah dewan direksi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Semakin banyak dan kompleks perusahaan, untuk menghasilkan kinerja yang maksimal tentu memerlukan jumlah dewan direksi yang sesuai. Apabila jumlah dewan direksi lebih dari satu, maka peraturan mengenai pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi, serta besar dan jenis penghasilannya ditentukan oleh RUPS yang diwakili oleh dewan komisaris.

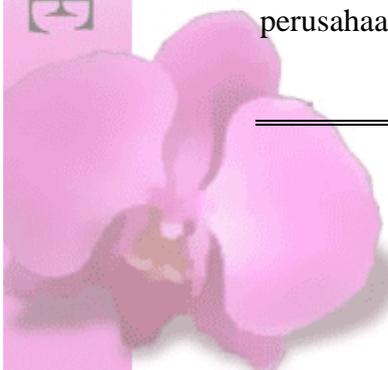
2.2.4.1 Pengukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksanaan operasi dan kepengurusan perusahaan. Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan. (Tangguh W,2014)

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi

2.2.5 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan



salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjabati kepentingan principal dan manajer di dalam perusahaan.

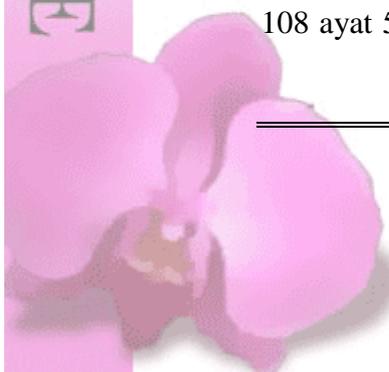
Sebagai wakil dari principal di dalam perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan agar tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dewan komisaris dapat mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen secara umum. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris, manajemen diharapkan dapat lebih memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, sebagai penyelenggara pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris dapat meningkatkan standar kinerja manajemen dalam perusahaan.

KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance. Sementara Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai inti Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (shareholder) dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota Dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Sembiring (2003) semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota Dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Hardikasari,2011).

2.2.5.1 Pengukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang mengemban dua tugas, yaitu mengawasi direksi dan memberi nasihat kepada direksi perusahaan. Dewan komisaris sangat penting dalam sistem corporate governance, yaitu mengawasi sekaligus memberi nasihat kepada pengelola perusahaan, ditegaskan lebih lanjut bahwa posisi dewan komisaris adalah menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas di samping sebagai pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. (Wahyu K,2012)

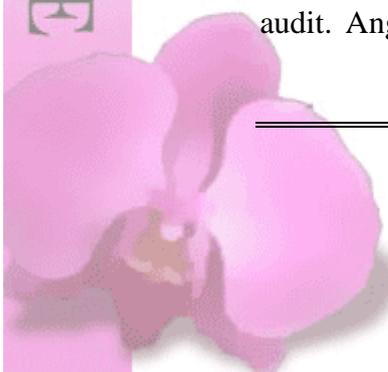
Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris

2.2.6 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Berdasarkan surat edaran BEJ,SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang,

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



anggota komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua komite. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Pembentukan komite audit tersebut harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan dewan komisaris. Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit efektif merupakan salah satu aspek penelitian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

2.2.6.1 Pengukuran Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik), dimana keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan terutama dalam hal monitoring atau pengawasan terhadap manajemen perusahaan dimana komite audit melakukan review masalah perilaku manajemen yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan serta melakukan kecurangan. Komite juga harus menjelaskan hambatan atas tidak tercapainya tujuan yang ditetapkan melalui diagnosa, diikuti dengan penetapan langkah serta upaya perbaikan, untuk kemudian melaporkan kepada dewan komisaris. (Niki L,2016)

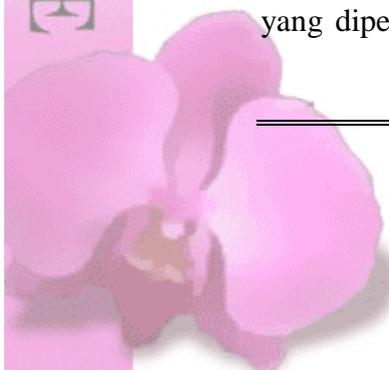
Ukuran Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit

2.2.7 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi. Hal ini tidaklah aneh karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen disamping memang

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



adalah suatu yang sudah biasa bahwa besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manager tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila manager sering berusaha meningkatkan prestasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh.

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mengantungkan diri sendiri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000 dalam Rahmawati dkk, 2006).

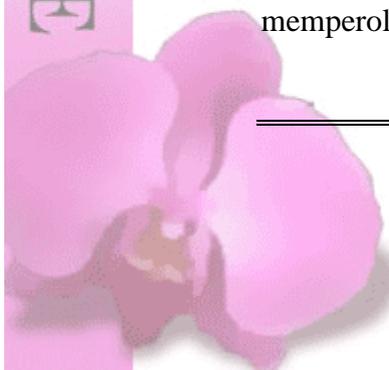
Kesimpulan yang saya dapat, manajemen laba adalah suatu usaha manager untuk meningkatkan prestasi manager tersebut dengan cara meningkatkan laba atau keuntungan yang di peroleh oleh suatu perusahaan tersebut.

2.2.7.1 Faktor – faktor pendorong manajemen laba

Dalam positif accounting teory terdapat tiga faktor pendorong yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan zimmerman, 1986) yaitu :

1. Bonus Plan Hypothesis

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini di karenakan manager lebih menyukai pemberian upah yang tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dengan istilah bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada dibawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh manager sedangkan jika laba berada diatas cap, manager tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada dibawah bogey, manager cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba



berada diatas cap. Jadi, hanya jika laba bersih berada diantara bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.

2. Debt Covenant Hypothesis

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

3. Political Cost Hypothesis

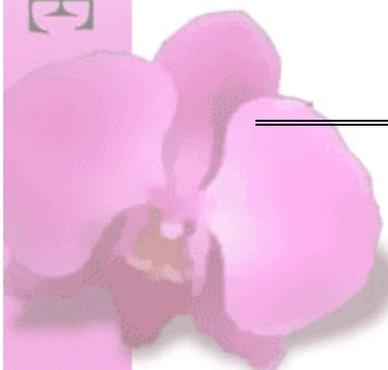
Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

2.2.7.2 Motivasi manajemen laba

Healy dan Wahlen (1999) membagi motivasi manajemen laba ke dalam tiga kelompok:

1. Motivasi Pasar Modal (*Capital Market Motivation*)

Motivasi manajemen laba karena alasan pasar modal lebih banyak disebabkan oleh adanya anggapan umum bahwa angka-angka akuntansi, khususnya laba merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh investor dalam menilai harga saham. Sehingga tidak mengherankan kalau ada sebagian manajer yang berusaha membuat laporan keuangannya tampil baik dengan maksud untuk mempengaruhi kinerja saham dalam jangka pendek. Manajemen cenderung melaporkan laba bersih rendah (*understate*) ketika melakukan *buy out*



dan melaporkan laba lebih tinggi (*overstate*) ketika melakukan penawaran saham ke publik.

2. Motivasi Kontrak (*Contracting Motivation*)

Motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Ada alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba.

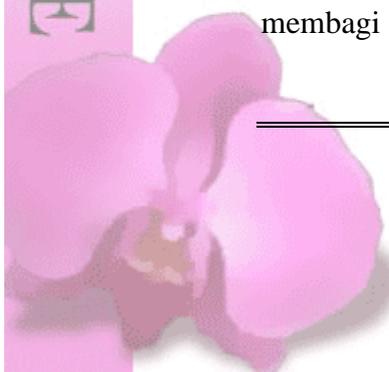
3. Motivasi Peraturan (*Regulation Motivation*)

Bagi para pembuat standar, perhatian terhadap manajemen laba menjadi penting karena manajemen laba apapun alasannya dapat mengarah kepada penyajian pelaporan keuangan yang tidak benar, dan akhirnya dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada. Manajer dapat memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pembiayaan, investasi maupun dalam bentuk (pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

2.2.7.3 Model Pengukuran Manajemen laba

1. Model Healy

Healy model (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual di seluruh variabel pembagian manajemen laba. Studi healy berbeda dengan kebanyakan studi manajemen laba lainnya karena ia memprediksi bahwa manajemen laba sistematis terjadi dalam setiap periode. Variabel pemisahnya membagi sampel menjadi tiga kelompok, dengan pendapatan diprediksi akan



dikelola keatas di salah satu kelompok dan ke bawah pada dua kelompok lainnya. Kesimpulan kemudian dilakukan melalui perbandingan berpasangan dari total akrual rata-rata pada kelompok dimana pendapatan diprakirakan akan dikelola ke atas dengan rata-rata total akrual untuk masing-masing kelompok dimana pendapatan diprediksi akan dikelola ke bawah. Pendekatan ini setara dengan memperlakukan seperangkat pengamatan dimana pendapatan diperkirakan akan dikelola keatas sebagai periode estimasi dan himpunan pengamatan dimana pendapatan diperkirakan akan dikelola kebawah sebagai periode peristiwa. Total akrual rata-rata dari periode estimasi kemudian mewakili ukuran akrual nondiscretionary. Total accruals (ACC) yang mencakup discretionary (Dat) dan non-discretionary (NDAt) components, dihitung sebagai berikut (Healy,1985) :

$$ACc_t = NA_t + DA_t ,$$

Selanjutnya total accrual diestimasi dengan menghitung selisih antara laba akuntansi yang dilaporkan dikurangi dengan arus kas operasi. Arus kas merupakan modal kerja dari aktivitas operasi dikurangi dengan perubahan-perubahan dalam persediaan dan piutang usaha, ditambah dengan perubahan – perubahan pada persediaan dan utang pajak penghasilan. Sehingga formula selengkapnya menjadi sebagai berikut (Healy,1985) :

$$ACc_t = -DEP_t - (XIt \times D1) + \Delta AR_t + \Delta INV_t - \Delta AP_t - \{(\Delta TP_t + Dt) \times D2\}$$

Keterangan:

DEP_t = Depresiasi di tahun t

XIt = Extraordinary Items di tahun t

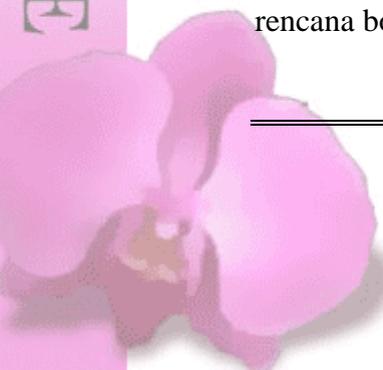
ΔAR_t = Piutang usaha di tahun t dikurangi piutang usaha di tahun t-1.

ΔINV_t = Persediaan di tahun t dikurangi persediaan di tahun t-1

ΔAP_t = Utang usaha di tahun t dikurangi utang usaha di tahun t-1

ΔTP_t = Utang pajak penghasilan di tahun t dikurangi utang pajak penghasilan di tahun t-1

$D1 = 1$ jika rencana bonus dihitung dari laba setelah extarordinary items, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum extarordinary items;



$D2 = 1$ jika rencana bonus dihitung dari laba sesudah pajak penghasilan, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan,

2. Model Modifikasi Jones

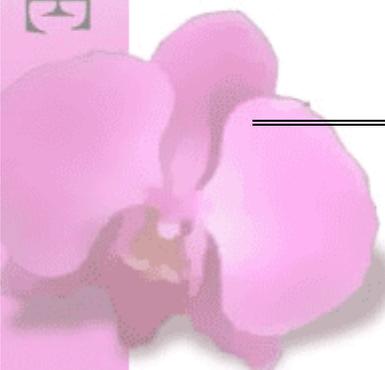
Dechow et al (1995) mempertimbangkan versi modifikasi model Jones dalam analisis empiris. Modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan kemungkinan dugaan model Jones untuk akrual diskresioner dengan kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan. Dalam model yang dimodifikasi, akrual nondiskretioner diperkirakan selama periode peristiwa (yaitu selama periode dimana manajemen laba dihipotesakan). Penyesuaian yang dilakukan terhadap model Jones asli adalah perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang pada periode kejadian. Model Jones asli secara implisit mengasumsikan bahwa diskresi tidak dilakukan terhadap pendapatan baik dalam periode estimasi atau periode peristiwa. Versi modifikasi model Jones secara implisit mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit pada periode kejadian berasal dari manajemen laba, hal ini didasarkan pada penalaran bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapat atas penjualan kredit daripada mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan tunai (Dechow et al, 1995). Jika modifikasi ini berhasil, maka perkiraan manajemen laba seharusnya tidak lagi bias terhadap nol dalam sampel dimana manajemen laba telah dilakukan melalui pengelolaan pendapatan. Formula selengkapnya dari Model John yang dimodifikasi adalah sebagai berikut (Dechow et al, 1995) :

1. Menghitung total accrual (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t dengan rumus sebagai berikut :

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya, total accrual diestimasi dengan ordinary least square sebagai berikut :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + e$$



Dengan menghitung koefisien regresi seperti pada rumus diatas, maka nondiscretionary accruals (NDA) ditentukan dengan formula sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{t-1}) + \beta_2 \{(\Delta REV_t - \Delta REC_t) / A_{t-1}\} + \beta_3 (PPE_t/A_{t-1})$$

Terakhir, discretionary accruals (DA) sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formula berikut :

$$DA_{it} = T_{ait} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = Discretionary Accruals perusahaan i dalam periode tahun t

NDA_{it} = Nondiscretionary Accruals perusahaan i dalam periode tahun t

TA_{it} = Total acrual perusahaan i dalam periode tahun t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t

CFO_{it} = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t

A_{it-1} = total assets perusahaan i dalam periode tahun t-1

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan I pada tahun t-1

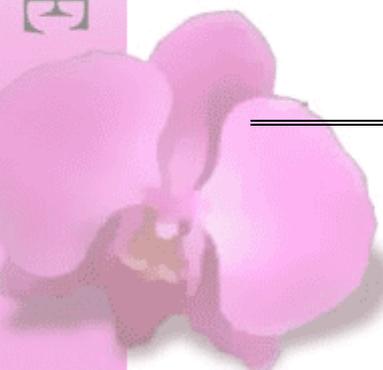
PPE_{it} = property, pabrik, dan peralatan perusahaan i dalam periode tahun t

ΔRec_{it} = piutang usaha perusahaan I pada tahun t dikurangi pendapatan perusahaan I pada tahun t-1.

ε = error

2.2.8 Definisi Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh



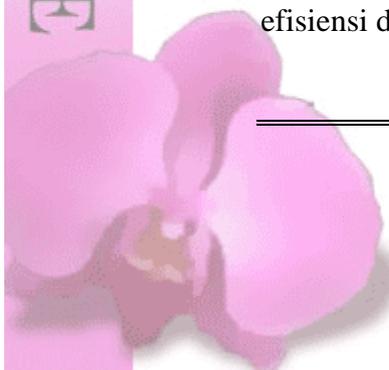
pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya. Sebelum memahami masalah penilaian kinerja lebih jauh, maka ada beberapa pengertian kinerja yaitu keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. (Mulyadi, 2007). Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

2.2.8.1 Manfaat Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan, adapun manfaat penilaian perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.



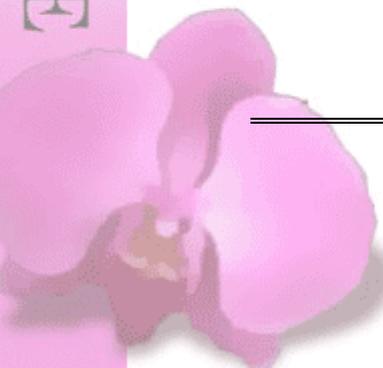
2.2.8.2 Tujuan Kinerja Perusahaan

Tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.2.8.3 Pengukuran kinerja perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto,2003). Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi , bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan dan dari segi perubahan harga saham.



Rasio keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa keuangan. Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Ang,1997) yaitu : rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas (leverage) dan rasio pasar. Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian yaitu kinerja operasi perusahaan dan kinerja pasar. Kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio yang sering digunakan adalah ROE dan Tobin's Q. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja perusahaan menggunakan ROE, karena ROE merupakan rasio antara net profit terhadap total equity. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholders equity) yang dimiliki oleh perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| NO | Nama Peneliti Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------|----------------------------|--|--|---|
| 1. | Vinola herawaty (2008) | Peran praktek GCG sebagai moderating variabel dari | metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu | hasil penelitian membuktikan bahwa GCG berpengaruh secara signifikan terhadap nilai |

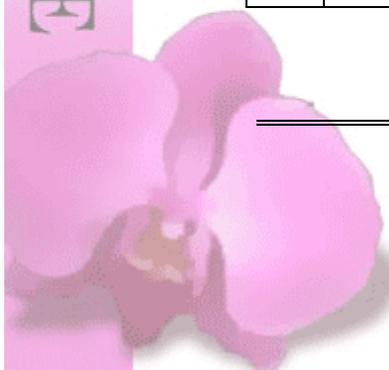
“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN”

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536

| | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|
| | | pengaruh earning management terhadap nilai perusahaan | dengan random sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. | perusahaan dengan variabel komparasi independen dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan sedangkan kualitas audit meningkatkan nilai perusahaan. |
| 2. | Iqbal Bukhori (2012) | Pengaruh GCG dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan | Pengumpulan data menggunakan metode random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap kinerja perusahaan. |
| 3. | Rio & Rosinta (2012) | Analisis pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan | Metode yang digunakan adalah purposive sampling | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara GCG dengan ROE (kinerja perusahaan) |
| 4. | Indra Satya P.A (2013) | Pengaruh ROA pada praktik manajemen laba dengan moderasi | | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa GCG mampu memoderasi hubungan antara ROA |

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536

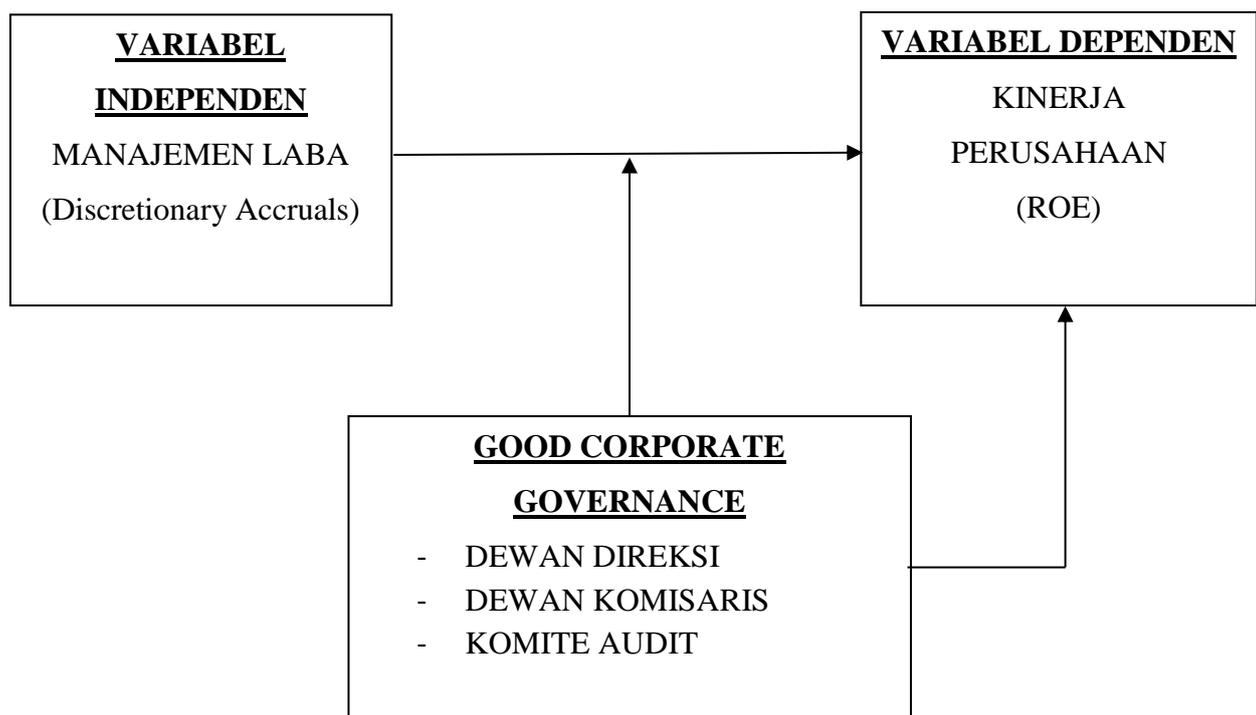


| | | | | |
|--|--|-----|--|------------------------------|
| | | GCG | | pada praktik manajemen laba. |
|--|--|-----|--|------------------------------|

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun masalah masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah Praktek Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi dari pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN”

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang sering kali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, kedua pihak tersebut berupaya untuk lebih mengutamakan kepentingannya masing – masing daripada kepentingan perusahaan. Sebagai agen, manager bertanggung jawab untuk mengoptimalkan laba para pemilik (prinsipal). Namun di lain pihak, manager juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Manager dapat mengatur laba yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih dan mengubah metode akuntansi yang digunakan. Mengubah metode akuntansi yang digunakan sama halnya dengan mengubah nilai sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut Theresia (2005) menyatakan manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapat laba yang sesuai dengan motivasinya. Menurut Gideon (2005) hal ini akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen. Beberapa studi terdahulu meneliti pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan namun penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada manajemen laba akrual.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah peran manajemen laba terhadap perusahaan maka semakin baik pula kinerja perusahaan, begitu pun sebaliknya jika manajemen laba semakin tinggi atau terlalu banyak maka dapat memperburuk kinerja perusahaan.

H_0 1 : Manajemen Laba tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan

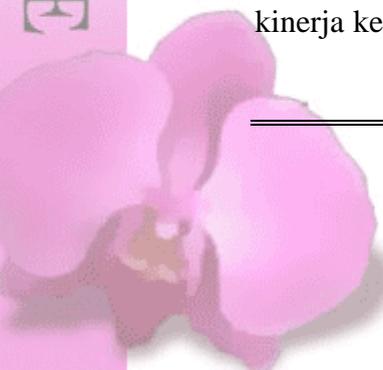
H_a 1 : Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan

2.5.2 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan

Penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. GCG yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik GCG merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di Negara Indonesia. Semakin tinggi penerapan GCG yang di ukur dengan corporate governance indeks perception semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Dey report (1994) dalam siallagan dan machfoedz (2006) mengemukakan bahwa corporate governance yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham. Sukamulja (2004) menyatakan bahwa adanya GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan dan pasar modal. Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal yang rendah akan mendorong para investor untuk melakukan investasi di suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik tata kelola perusahaan maka akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang baik pula.

H₀₂ : Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

H_{a2} : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

2.5.3 Pengaruh GCG Memoderasi Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan
Manajemen laba dilakukan oleh manager dengan merekayasa laba perusahaannyamenjadi lebih tinggi, rendah ataupun selalu sama selama beberapa periode dengan memanfaatkan fleksibilitas pelaporan keuangan. Begitu pula dengan kinerja keuangan, semakin baik kinerja tersebut maka semakin besar pula bonus yang akan diterima oleh manajemen sehingga akan termotivasi melakukan tindakan manajemen laba. Peran Good Corporate Governance dalam hipotesa disini adalah sebagai variabel moderasi dimana keberadaannya untuk mengetahui apakah hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance disini

**“PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DARI PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN”**

Author: Theo Ellen Lawalata NPK: A. 2015. 4. 33536



memperkuat atau memperlemah antara manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. Proksi corporate governance dalam hipotesa disini adalah dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance. Dewan direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal, perusahaan dilakukan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan standart audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Peran komite audit yang sangat penting ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

H_03 : Good Corporate Governance tidak memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap Kinerja Perusahaan

H_a3 : Good Corporate Governance memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap Kinerja Perusahaan

